

PENGARUH EKONOMI, SOSIAL, LINGKUNGAN, TATA RUANG DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP KINERJA PEDAGANG KAKI LIMA BIDANG KULINER

EFFECT ON ECONOMIC, SOCIAL, ENVIRONMENT, LAYOUT AND PUBLIC ORDER ON THE PERFORMANCE OF PKL KULINER

E Yuningsih^{1a}, Yuliani² dan D Gemina²

¹Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi, Telpon (0251-8240773) Kode Pos 16720 Ciawi Bogor

²Alumni Program Studi Manajemen Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Telp (0251-8240773) Kode Pos 16720 Ciawi Bogor

^aKorespondensi: Erni Yuningsih, E-mail: erni.yuningsih@unida.ac.id

(Diterima: 26-12-2011; Ditelaah: 05-01-2012; Disetujui: 21-03-2012)

ABSTRACT

Research objectives were to determine: 1) the influence of simultaneous economic, social, environment, layout, and public order on the performance of PKL, 2) a partial influence of economic, social, environment, layout, and public order on performance of PKL, and 3) enabling and constraining factors PKL performance. The population in this study is the culinary field merchandisers Central Bogor, samples used by 95 respondents using sampling methods using non-probability sampling (random sampling). Questionnaire data collection techniques, methods of testing the validity and reliability of data, while data analysis techniques using multiple regression analysis, the correlation coefficient, coefficient of determination and statistical test (F test and t test). Based on the results of the simultaneous study of economic, social, environmental, zoning, public order effect on the performance of PKL, the value of R Square of 0.605. Of the t test showed that layout and public order is partially significant effect on the performance of PKL, while the economic, social, environment, real impact on the performance of PKL. PKL is a performance limiting factor of spatial and public order, and the performance of PKL supporting factors are economic, social and environment.

Keywords: economic, social, environment, layout, and public order.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh secara simultan faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang, dan ketertiban umum terhadap kinerja pedagang kaki lima (PKL); 2) pengaruh secara parsial faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang, dan ketertiban umum terhadap kinerja PKL; 3) faktor penghambat dan pendorong kinerja PKL. Populasi dalam penelitian ini adalah PKL bidang kuliner Bogor Tengah, sampel yang digunakan sebanyak 95 responden dengan menggunakan metode penarikan sampel menggunakan *non-probability sampling* (penarikan sampel secara acak). Teknik pengumpulan data ini menggunakan kuesioner dengan metode pengujian data uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji statistik (uji F dan uji T). Berdasarkan hasil penelitian secara simultan faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang, ketertiban umum berpengaruh terhadap kinerja PKL, nilai R *Square* sebesar 0,605. Dari uji T menunjukkan bahwa tata ruang dan ketertiban umum secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja PKL, sedangkan ekonomi, sosial, dan lingkungan berpengaruh nyata terhadap kinerja PKL. Faktor penghambat kinerja PKL adalah tata ruang dan ketertiban umum, dan faktor pendukung kinerja PKL adalah ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kata kunci: ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang, dan ketertiban umum.

Yuningsih E, Yuliani, dan D Gemina. 2012. Pengaruh ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang dan ketertiban umum terhadap kinerja pedagang kaki lima bidang kuliner. *Jurnal Sosial Humaniora* 3(1): 2032

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan. Peranan pembangunan nasional baik di bidang ekonomi maupun sosial, termasuk pembangunan kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya tidak mungkin berlangsung tanpa didukung oleh stabilitas politik dan keamanan, serta berlangsungnya proses perwujudan hukum dan pemerintah yang bersih. Menurut Korten (2001), masalah pembangunan yang kritis untuk tahun 1990-an bukanlah pertumbuhan, melainkan transformasi seperti pranata, nilai-nilai, dan perilaku yang sesuai dengan ekologi dan sosial. Transformasi ini menangani tiga kebutuhan masyarakat global, yaitu keadilan, berkelanjutan dan ketercakupan. Masalah pembangunan bukanlah memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi saja (sesuai paradigma pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi belaka), tetapi juga kebutuhan masyarakat global yakni keadilan, berkelanjutan dan ketercakupan. Paradigma pembangunan berpusat pada rakyat yang menempatkan manusia atau rakyat baik secara individu maupun kelompok bukan lagi ditempatkan dalam objek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan tentunya rakyat atau manusia akan berperan sangat besar untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Berkenaan dengan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat, saat ini kondisinya diwarnai dengan tingginya angka pengangguran. Tingkat pengangguran di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan, diikuti dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota, sehingga menjadikan pertimbangan penduduk kota meningkat cepat. Laju pertumbuhan penduduk perkotaan disamping disebabkan arus urbanisasi juga disebabkan pertumbuhan

penduduk alami. Tingginya arus urbanisasi disebabkan karena mereka (para urban) memiliki pertimbangan yang didasarkan atas *ekspektasi* (dugaan dan harapan) bahwa pekerjaan di kota akan memberikan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendapatan di daerah asal, padahal para urban tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan di perkotaan.

Menurut *The International Labour Organization* (ILO) dalam *United Nation Development* (1998) mengestimasi bahwa secara ekonomis penduduk perkotaan di negara-negara berkembang pada akhir tahun 1980-an mencapai 82,5 juta jiwa dan tahun 2025 diperkirakan mencapai 1,7 milyar jiwa, sehingga dari peningkatan jumlah penduduk perkotaan diperkirakan 228 juta lapangan pekerjaan baru harus tersedia. Menurut ILO sebagian pekerjaan baru tersebut disediakan oleh sektor informal, oleh karena itu kebijaksanaan pembangunan harus ditunjukkan pada perusahaan atau radikalisasi kelembagaan yang memajukan sifat atau jiwa kewirausahaan dalam sektor informal. Banyaknya migrasi penduduk dari desa ke kota akan menimbulkan permasalahan besar di daerah perkotaan. Sebagian urban belum tentu langsung mendapatkan pekerjaan, sehingga menimbulkan angka pengangguran yang cukup tinggi. Tenaga kerja yang terserap ke dalam sektor formal adalah 30,51% dan sisanya 69,49% berada di sektor informal. Jumlah sektor informal saat ini sekitar 42 juta unit (ILO 1998). Adapun uraian penduduk menurut jenis kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Penduduk menurut jenis kegiatan tahun 2010-2011 (juta orang) di Indonesia

No	Jenis Kegiatan	2010		2011	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus
1.	Angkatan kerja:	116,00	116,53	119,40	117,37
	Bekerja	107,41	108,21	111,28	109,67
	Penganggur	8,59	8,32	8,12	7,70

Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	67,83	67,72	69,96	68,34
Tingkat pengangguran terbuka	7,41	7,14	6,80	6,56
Pekerja tidak penuh:	32,80	33,27	34,19	34,59
4. Setengah penganggur	15,27	15,26	15,37	13,52
Paruh waktu	17,53	18,01	18,46	21,06

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2012

Sektor informal merupakan unit usaha kecil dengan modal yang diperlukan juga kecil, bahkan sistem pengolahannya sangat sederhana. Meskipun dengan modal kecil, orang-orang yang bekerja di sektor informal dapat mempertahankan hidupnya. Sebagian pendatang yang masuk memiliki *skill* yang tinggi dan sebagian lagi tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Migran yang memiliki *skill* tinggi masuk ke dalam sektor formal dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan migran yang memiliki *skill* rendah masuk ke dalam sektor informal seperti PKL, tidak memberikan tambahan *income* banyak terhadap daerah, merusak estetika kota dan menimbulkan kemacetan kota.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu kegiatan ekonomi yang memiliki basis dari kalangan masyarakat dengan keterjangkauan modal yang minim. UMKM mengarah pada pasar persaingan sempurna, dimana kondisi keluar masuk pasar terjadi. Spesialisasi dan struktur pasar tersebut membuat UMKM cenderung fleksibel dalam memilih dan berganti usaha. Terbentuknya usaha kecil informal baru akibat banyaknya pemutusan hubungan kerja di masa-masa krisis. Selain itu, daya tahan UMKM tercipta karena mereka tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti utang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan usahanya, karena umumnya UMKM menggunakan bahan baku dari sumber alam lokal.

UMKM tidak dapat lepas dari komunitas pedagang sebagai pelakunya, salah satunya lebih dikenal dengan sebutan Pedagang Kaki

Lima (PKL). PKL adalah mereka yang bekerja dengan memanfaatkan situasi, tempat dan keramaian yaitu dengan berjualan di trotoar jalan atau di tempat lainnya. Pedagang kaki lima merupakan salah satu profesi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat berpendidikan rendah dengan pengalaman serta keterampilan yang sangat terbatas. Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya, karena pedagang kaki lima dapat lebih mudah untuk dijumpai oleh konsumen daripada pedagang resmi yang bertempat tetap. Sehingga konsumen dimudahkan untuk memenuhi kebutuhan untuk barang-barang eceran. PKL selalu memanfaatkan tempat-tempat yang dipandang senantiasa menghasilkan profit, misalkan pusat kota, alun-alun, dan pusat keramaian hingga tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi tempat wisata.

Kondisi dan keberadaan pedagang kaki lima di Kota Bogor tidak dapat dipungkiri memiliki peran dan fungsi tersendiri bagi perekonomian perkotaan. Dalam konteks pembangunan di Kota Bogor, keberadaan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam usaha kecil ternyata memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Namun pada banyak hal yang selalu dikemukakan adalah dampak negatif seperti menyebabkan kemacetan, kesemrawutan kota, kesan kumuh, dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan lingkungan menjadi tidak sehat dan kurang aman.

Fenomena PKL yang akan terus terjadi di Kota Bogor akan menyulitkan Pemerintah Daerah (Pemda) Bogor. Walaupun Peraturan Daerah (Perda) sudah dikeluarkan pada tahun 2005, jumlah PKL semakin banyak bahkan saat ini sudah mendekati angka sepuluh ribuan dan untuk PKL di bidang kuliner mencapai angka lima ribuan (Radar Bogor, 19 Mei 2011). Jangka waktu yang diberikan pemerintah untuk menuntaskan masalah PKL terakhir Oktober 2009 tidak akan dapat menyelesaikan masalah sampai ke akar kalau pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kekerasan. Pendekatan kekerasan yang telah dilakukan pemerintah hanya akan menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi Bogor dan daya tarik Bogor bagi pendatang yang memiliki *skill*

tinggi. Ketidakstabilan, anarkisme dan ketidakstabilan akan menurunkan citra Bogor sebagai salah alternatif kawasan pemukiman favorit dan daya tarik wisata. Permasalahan PKL selalu menjadi prioritas pemerintah, disamping selain memberikan pendapat juga sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pendapatan distribusi. Permasalahan yang ditimbulkan PKL antara lain: (1) segi aspek ekonomi ialah keterbatasan manajemen usaha dan kesulitan dalam permodalan, (2) segi aspek sosial ialah kurangnya kesadaran terhadap peraturan kependudukan (masih banyak beroperasi di tempat yang dilarang untuk berjualan), (3) segi aspek lingkungan ialah kurang memerhatikan kebersihan lingkungan di sekitar lokasi usaha yang mengakibatkan pencemaran lingkungan serta pengawasan terhadap kebersihan lingkungan masih rendah, (4) segi aspek tata ruang ialah penggunaan ruang publik yang bukan semestinya sehingga dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri, dan (5) segi aspek ketertiban umum ialah kesadaran PKL terhadap peraturan ketertiban umum tersebut masih rendah sehingga keberadaannya menimbulkan kemacetan kota. Permasalahan-permasalahan tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja atau perkembangan usaha PKL bidang kuliner wilayah Bogor Tengah. Hal lain juga dikarenakan adanya razia penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta keinginan untuk mengembangkan usaha dagang mengalami hambatan dikarenakan sulitnya untuk memperoleh modal yang diperlukan sehingga usaha tersebut tidak memberikan kepuasan bagi PKL.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh secara simultan faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang dan ketertiban umum terhadap kinerja pedagang kaki lima (PKL) bidang kuliner?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang dan ketertiban umum terhadap kinerja pedagang kaki lima (PKL) bidang kuliner?

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat kinerja pedagang kaki lima (PKL) bidang kuliner?

Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk:

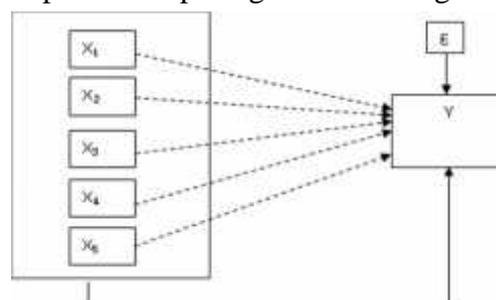
1. mengetahui pengaruh secara simultan faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang, dan ketertiban umum terhadap kinerja pedagang kaki lima (PKL) bidang kuliner;
2. mengetahui pengaruh secara parsial faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang dan ketertiban umum terhadap kinerja pedagang kaki lima (PKL) bidang kuliner;
3. mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja pedagang kaki lima (PKL) bidang kuliner.

Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh pihak yang terkait khususnya pedagang kaki lima dan pengambil kebijakan dapat memberikan masukan bagi dinas terkait seperti Koperasi dan UMKM Kota Bogor untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pembangunan dan penyelesaian permasalahan pedagang kaki lima.

Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan yaitu terdapat pengaruh secara simultan dan parsial antara faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang, dan ketertiban umum terhadap kinerja pedagang makanan kaki lima (PKL). Untuk mengetahui pengaruh antarvariabel pengaruh faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang dan ketertiban umum terhadap kinerja pedagang kaki lima di wilayah Bogor Tengah, adapun paradigma penelitian dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma penelitian

Kajian Teoretis

Secara spesifik, De Soto (1989) mengklasifikasikan sektor informal dalam tiga kelompok utama, antara lain: a) subsektor perumahan dan pertanahan informal, misalnya permukiman spontan atau tidak terencana; b) subsektor transportasi informal, misalnya becak atau ojek dan; c) subsektor perdagangan informal, misalnya pedagang kaki lima (PKL) atau asongan. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu sektor informal yang banyak mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Menurut Alma (2006), pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, kemampuan terbatas, berlokasi ditempat atau pusat-pusat konsumen, dan tidak memiliki izin usaha. Menurut Alisjahbana (2006), pedagang kaki lima adalah kegiatan usaha yang dilakukan para pedagang yang menempati ruangan kosong di pinggir-pinggir jalan seperti trotoar, taman-taman kota dan tempat usaha lainnya yang bukan miliknya. Alisjahbana (2006) berdasarkan penelitiannya di Kota Surabaya telah mengategorikan pedagang kaki lima menjadi empat tipologi. Keempat tipologi tersebut adalah: a) pedagang kaki lima murni yang masih bisa dikategorikan PKL, dengan skala modal dan keterampilan terbatas, dikerjakan oleh orang yang tidak mempunyai pekerjaan selain pedagang kaki lima, dan tenaga kerja yang bekerja adalah anggota keluarga; b) pedagang kaki lima yang hanya berdagang ketika ada bazar (pasar murah atau pasar rakyat, berjualan di masjid pada hari Jumat, dan halaman kantor-kantor); c) pedagang kaki lima yang sudah melampaui ciri pedagang kaki pertama dan kedua, yakni pedagang kaki lima yang telah mampu mempekerjakan orang lain, mempunyai karyawan, membawa barang dagangan dan peraganya dengan mobil, dan bahkan ada yang mempunyai stan lebih dari satu tempat. Pedagang kaki lima yang termasuk dalam tipologi ini adalah pedagang kaki lima yang berpindah-pindah tempat dengan menggunakan mobil bak terbuka; d) pedagang kaki lima yang termasuk pengusaha kaki lima. Mereka hanya mengoordinasikan tenaga kerja yang menjualkan barang-barangnya. Pedagang

kaki lima jenis ini yaitu pedagang kaki lima yang mempunyai toko, karena tokonya berperan sebagai grosir yang menjual barang dagangannya kepada pedagang kaki lima tidak bermodal dan barang yang diambil baru dibayar setelah barang tersebut laku.

Keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat melalui kinerja dan tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja tersebut. Ada beberapa aspek yang memengaruhi kinerja PKL, seperti berikut:

1. aspek ekonomi, yaitu pemberdayaan PKL (usaha mikro) perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan dengan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan potensinya dalam meningkatkan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Menurut Bromley (1979), kegiatan ekonomi formal dan informal tidak terpisah, bahkan terus-menerus saling berinteraksi, maka dukungan pemerintah kepada dua sektor tersebut harus seimbang, dan tetap menumbuhkan iklim kompetisi bagi usaha kecil. Keanekaragaman kegiatan usaha di sektor informal juga memerlukan kebijakan yang berbeda-beda;
2. aspek sosial, yaitu mencakup penguatan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia (pendidikan dan keterampilan), migrasi penduduk, kriminalitas;
3. aspek lingkungan. Menurut Jhingan (2008), kondisi lokasi PKL secara umum tidak lepas dari masalah kebersihan dan keindahan lingkungan, karena aspek ini dapat memiliki nilai jual (citra) dari lokasi usaha tersebut. Peningkatan kebersihan lingkungan di lokasi PKL merupakan hal yang penting, karena menyangkut kenyamanan para pembeli. Hambatan utama penataan kebersihan adalah kurangnya kesadaran kolektif para pedagang akan kebersihan, mereka cenderung mengabaikan kebersihan dan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan. Disamping itu, sistem *drainase* lingkungan yang buruk, saluran air yang kurang memadai juga mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar lokasi PKL;

4. aspek tata ruang. Sani (2007) mendefinisikan ruang terbuka sebagai keseluruhan *landscape*, perkerasan (jalan dan trotoar), taman dan tempat rekreasi di dalam kota. Elemen ruang terbuka termasuk didalamnya taman-taman, ruang terbuka hijau kota, bangku, bak tanaman, air, penerangan, patung, alur pejalan kaki, papan petunjuk dan sebagainya. Aktivitas PKL cenderung memanfaatkan ruang terbuka sebagai lokasi usahanya, yang berakibat beralih-fungsinya ruang terbuka hijau sebagai prasarana kota, seperti taman, jalur hijau dan ruang terbuka lainnya. Keberadaan taman bukan hanya untuk menciptakan keindahan dan kebersihan saja, tetapi juga diharapkan dapat menjaga dan mengembalikan fungsi lingkungan seperti untuk peresapan air, menjaga dan meningkatkan populasi flora dan fauna, dan lain sebagainya sehingga ruang kota tertata secara serasi dan seimbang;
5. aspek ketertiban umum, yaitu kurangnya tingkat kesadaran para pedagang maupun masyarakat sekitar terhadap peraturan ketertiban umum, menambah kesemrawutan dan kemacetan yang timbul akibat usaha kaki lima.

MATERI DAN METODE

Objek penelitian ini adalah PKL bidang kuliner di wilayah Bogor Tengah. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja pedagang kaki lima di bidang kuliner di wilayah Bogor Tengah. Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan bentuk penelitian verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan wilayah Bogor Tengah. Adapun bentuk penelitian verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis yang menggunakan perhitungan statistik (Nasir 2003). Metode penelitian sampel adalah penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama. Jenis data primer yang dibutuhkan dengan metode wawancara dan menggunakan kuesioner terstruktur yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang menjadi responden terpilih serta melakukan observasi. Data sekunder didapat dengan menelaah data yang diperoleh dari Kantor

Koperasi dan UMKM Kota Bogor, serta publikasi yang diterbitkan.

Variabel *independent* (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang dan ketertiban umum. Variabel *dependent* (variabel terikat) adalah kinerja pedagang kaki lima di bidang kuliner. Adapun indikator dari kinerja pedagang kaki lima tersebut antara lain meliputi: 1) keberhasilan usaha pedagang kaki lima, 2) kepuasan usaha pedagang kaki lima, 3) prospek usaha pedagang kaki lima untuk masa yang akan datang, dan 4) laba dan omset yang diperoleh pedagang kaki lima setiap hari dan setiap bulannya.

Populasi adalah sejumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Berdasarkan pengertian tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah pedagang makanan kaki lima yang tersebar di wilayah Bogor Tengah, lokasinya terdiri dari Jl. Kapten Muslihat, Jl. Dewi Sartika (dari depan BRI), Jl. Dewi Sartika (depan Sartika Plaza), Jl. Lawang Saketeng dan Empang yang berjumlah 1007 pedagang. Menurut Sugiono (2007) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Untuk menentukan ukuran sampel berdasarkan rumus dari Rakhmad dalam Juliwati (2010), diperoleh sampel sebanyak 95 responden. Penarikan sampel yang terpilih dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel acak yang distratifikasi secara banding. Hal ini dilakukan karena objek penelitian relatif bersifat homogen. Untuk mengetahui ukuran sampel di wilayah Bogor Tengah dilakukan *proposional random sampling* dengan perincian Jalan Kapten Muslihat 15, Jalan Dewi Sartika (dari Depan BRI) 13, Jalan Dewi Sartika (Depan Sartika Plaza) 30, Jalan Lawang Sekteng 24, dan Jalan Empang 13.

Definisi Operasional

Berikut definisi operasional dalam penelitian ini antara lain:

1. Ekonomi yaitu pemberdayaan PKL (usaha mikro) perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan dengan menumbuhkan iklim usaha yang

kondusif pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan potensinya dalam meningkatkan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan (Jhingan 2008).

2. Sosial yaitu aspek sosial berupa penguatan kelembagaan, pranata, migrasi penduduk dan kriminalitas (Jhingan 2008).
3. Lingkungan yaitu kondisi lokasi PKL tidak lepas dari masalah kebersihan dan keindahan lingkungan, dimana aspek ini dapat memiliki nilai jual (citra) dari lokasi usaha tersebut (Jhingan 2008).
4. Tata ruang yaitu ruang terbuka sebagai keseluruhan *landscape*, pengerasan (jalan dan trotoar), taman dan tempat rekreasi di dalam kota (Firdausy 1995).
5. Ketertiban umum yaitu kurangnya tingkat kesadaran para pedagang maupun masyarakat sekitar terhadap peraturan dan ketertiban umum, serta menambah kesemrawutan dan kemacetan yang timbul akibat usaha kaki lima, sehingga perlu dilakukan pengaturan sampai dengan penertiban (Firdausy 1995).
6. Kinerja yaitu keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu (Wirawan 2009). Kinerja diukur berdasarkan ukuran finansial dan non finansial. Finansial yang meliputi keberhasilan (*perceived success*), kepuasan (*satisfaction*) dan pencapaian tujuan (*goal achievements*), sedangkan non finansial meliputi penjualan (*sales*), keuntungan (*profit*) dan pertumbuhan (*growth*).

Metode Analisis Data

Data yang dimasukkan akan di cek ulang kebenarannya dan kelengkapannya sebelum dilakukan analisis. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS. Hasil analisis kemudian ditampilkan secara deskriptif baik kualitatif maupun kuantitatif dan dilengkapi dengan menggunakan tabel agar lebih komunikatif. Sedangkan untuk analisis data digunakan analisis statistik inferensial yaitu

analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas (X) terhadap variabel (Y) secara simultan. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh tunggal antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Analisis determinasi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi pengaruh faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang dan ketertiban umum terhadap kinerja pedagang kaki lima.

Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen digunakan uji F (Singarimbun 1995). Apabila nilai signifikansi F lebih kecil dari 5% atau F hitung < F tabel maka dinyatakan signifikan yang berarti secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji T (Singarimbun 1995). Apabila nilai signifikansi lebih kecil t lebih kecil dari 5% atau t hitung < t tabel, maka dinyatakan secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan (item) yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang, ketertiban umum, dan kinerja.

Hasil perhitungan dengan signifikansi diambil, kemudian dibandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel dan alpha sebesar 0,05, maka diperoleh pernyataan yang berhubungan.

Metode pengujian reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik Cronbach. Hasil pengujian dikatakan handal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 (> 0,6). Data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil perhitungan validitas dan reliabilitas

Variabel/ Sub Variabel	Item Pernyataan	Korelasi	Batas	Kesimpulan	Koefisien Reliabilitas
Ekonomi	1	0,743	0,514	Valid	0,641
	2	0,516	0,514	Valid	
	3	0,632	0,514	Valid	
	4	0,640	0,514	Valid	
	5	0,676	0,514	Valid	
	6	0,632	0,514	Valid	
Sosial	7	0,516	0,514	Valid	0,714
	8	0,640	0,514	Valid	
	9	0,516	0,514	Valid	
	10	0,961	0,514	Valid	
Lingkungan	11	0,676	0,514	Valid	0,688
	12	0,816	0,514	Valid	
	13	0,756	0,514	Valid	
Tata Ruang	14	0,516	0,514	Valid	0,701
	15	0,640	0,514	Valid	
	16	0,640	0,514	Valid	
Ketertiban Umum	17	0,704	0,514	Valid	0,652
	18	0,617	0,514	Valid	
	19	0,561	0,514	Valid	
	20	0,594	0,514	Valid	
	21	0,640	0,514	Valid	
Kinerja	22	0,632	0,514	Valid	0,706
	23	0,743	0,514	Valid	

Karakteristik Responden

Sebagaimana yang diungkapkan dalam metode penelitian bahwa jumlah PKL yang dijadikan sampel adalah 95 orang. PKL yang menjadi sampel dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, lama tinggal di Bogor, status perkawinan, status tempat tinggal, modal usaha, sumber pinjaman, status kepemilikan tempat usaha, perizinan, lama usaha, tanggungan keluarga, modal awal, dan pungutan harian

No.	Uraian	Persentase (%)
I.	Jenis Kelamin	
	- Laki-laki	41
	- Perempuan	59
	Jumlah	100
II.	Usia	
	- 18-30 tahun	8
	- 31-40 tahun	33
	- 41-50 tahun	46
	- 51-65 tahun	13
	Jumlah	100

III.	Pendidikan		
	- SD	24	
	- SMP	33	
	- SMA	35	
	- Akademik	-	
	- Diploma	-	
	- Sarjana	-	
	- Tidak Sekolah	8	
		Jumlah	100
	IV.	Lama Tinggal di Bogor	
- 1-5 tahun		9	
- 6-10 tahun		22	
- 11-15 tahun		26	
- diatas 15 tahun		43	
	Jumlah	100	
V.	Status Perkawinan		
	- Menikah	75	
	- Belum Menikah	7	
	- Janda	14	
	- Duda	4	
	Jumlah	100	

VI.	Status Tempat Tinggal	
	- Sendiri	54
	- Mengontrak	35
	- Menumpang	11
	Jumlah	100
VII.	Modal Usaha	
	- Sendiri	58
	- Pinjaman	23
	- Sendiri dan Pinjaman	19
	- Lain-lain	-
	Jumlah	100
VIII.	Sumber Pinjaman	
	- Bank	17
	- Koperasi	11
	- Asosiasi PKL	-
	- Lain-lain	72
	Jumlah	100
IX.	Status Kepemilikan Tempat Usaha	
	- Milik Sendiri	31
	- Milik Pemerintah	5
	- Sewa	64
	Jumlah	100
X.	Perijinan	
	- Memiliki	43
	- Tidak memiliki	57
	Jumlah	100
XI.	Lama Usaha	
	- < 1 tahun	-
	- 1-5 tahun	46
	- > 5 tahun	54
	Jumlah	100
XII.	Tanggungan Keluarga	
	- 1-3 orang	47
	- 4-6 orang	51
	- >7 orang	2
	Jumlah	100

XIII. Modal Awal

- < Rp 500.000	22
- Rp 500.000- Rp 1.500.000	31
- Rp 1.500.000- Rp 3.000.000	46
- >Rp 3.000.000	1
Jumlah	100

XIV. Pungutan Harian

- < Rp 5.000	86
- Rp 5.000-Rp 10.000	13
- >Rp 10.000	1
Jumlah	100

Secara historis wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah perdagangan. Profil responden mayoritas berjenis kelamin laki-laki, berusia produktif 41-50 tahun, rata-rata berpendidikan dominan adalah SMA, bersifat menetap dengan lama tinggal lebih diatas 15 tahun, sebagian besar pedagang memiliki status perkawinan menikah, dan kepemilikan rumah mayoritas milik sendiri. Kebanyakan PKL menggunakan modal sendiri yang menunjukkan bahwa mereka masih terbatas menggunakan modal dari luar (pinjaman). Sumber pinjaman kebanyakan berasal pinjaman dari keluarga, teman maupun kerabat. Mayoritas sewa menunjukkan bahwa para pedagang belum memiliki kemampuan membeli tempat usaha sendiri. Sebagian besar PKL tidak memiliki perizinan karena biasanya mereka berjualan di tempat keramaian, seperti badan jalan, trotoar, jalur hijau dan tempat yang dilarang untuk berjualan. Para PKL yang sudah berdagang di atas 5 tahun menunjukkan usaha mereka cukup memberikan pendapatan bagi mereka, sehingga mereka dapat bertahan dengan usahanya, memiliki tanggungan sebanyak 4-6 orang, memiliki modal awal diatas Rp 1.500.000 dan pungutan harian rata-rata PKL dipungut kurang dari Rp 5.000.

Aspek Ekonomi

Berdasarkan hasil jawaban PKL mengenai aspek ekonomi, berikut rekapitulasi indikator aspek ekonomi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rekapitulasi skor tanggapan PKL mengenai aspek ekonomi

No	Indikator	Jawaban PKL	Keterangan
1	Aspek Permodalan	3,70	Mudah
2	Aspek Pemasaran	3,76	Mudah
3	Perbaikan Manajemen Usaha	4,09	Penting
4	Kualitas Produk	4,92	Sangat Memperhatikan
5	Sarana dan Prasarana Usaha	3,82	Lengkap
6	Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Besar	3,12	Cukup Penting
Total		23,41	
Nilai Rata-rata		3,90	Penting

Berdasarkan tabel tersebut, skor tanggapan PKL tentang aspek ekonomi rata-rata mencapai 3,90 dengan kategori penting. Hal ini menunjukkan bahwa PKL menganggap indikator kualitas produk memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 4,92, sedangkan indikator kemitraan usaha mikro kecil menengah dan besar memiliki skor terendah yaitu sebesar 3,12. Belum optimalnya penyuluhan kemitraan antara PKL dengan Dinas Koperasi dan UMKM menjadi penyebab kurangnya informasi bagi PKL yang ingin menjalin kerja sama dengan UMKM lainnya, sehingga diperlukan penyuluhan yang optimal dari dinas tersebut.

Aspek Sosial

Berdasarkan hasil jawaban PKL mengenai aspek sosial, berikut rekapitulasi indikator aspek sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Rekapitulasi Skor Tanggapan PKL Mengenai Aspek Sosial

No	Indikator	Jawaban PKL	Keterangan
1	Pembinaan Advokasi Sosial (Termasuk Kesehatan dan Agama)	3,14	Cukup Baik
2	Pengawasan terhadap Penduduk Urban (Pendatang)	3,32	Cukup Baik
3	Penertiban terhadap Penduduk Urban	3,58	Baik
4	Penguatan Kelembagaan atau Asosiasi PKL	3,00	Cukup Membantu
Total		13,04	
Nilai Rata-rata		3,26	Cukup Baik

Berdasarkan tabel tersebut, skor tanggapan PKL tentang aspek sosial rata-rata mencapai 3,26 dengan kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa PKL menganggap indikator penertiban terhadap penduduk urban memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 3,58, sedangkan indikator penguatan kelembagaan atau asosiasi PKL memiliki skor terendah sebesar 3,00. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan atau asosiasi PKL belum dilakukan secara optimal. Dalam hal ini dinas terkait hendaknya melakukan evaluasi dan penyuluhan secara optimal terhadap kelembagaan atau asosiasi PKL, maka peran koperasi perlu untuk ditingkatkan.

Aspek Lingkungan

Berdasarkan hasil jawaban PKL mengenai aspek lingkungan, berikut rekapitulasi indikator aspek lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Rekapitulasi skor tanggapan PKL mengenai aspek lingkungan

No	Indikator	Jawaban PKL	Keterangan
1	Pengawasan terhadap Kebersihan dan Keindahan Lingkungan	4,11	Baik
2	Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kebersihan Lingkungan	4,04	Baik
Total		8,15	
Nilai Rata-rata		4,07	Baik

Berdasarkan tabel tersebut, skor tanggapan PKL tentang aspek lingkungan rata-rata mencapai 4,07 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa PKL menganggap indikator pengawasan terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 4,11, sedangkan indikator penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum terhadap kebersihan lingkungan memiliki skor terendah yaitu sebesar 4,04. Dalam hal ini dinas kebersihan harus lebih optimal di dalam menindak tegas terhadap pelanggaran kebersihan.

Aspek Tata Ruang

Berdasarkan hasil jawaban PKL mengenai aspek tata ruang, berikut rekapitulasi indikator aspek tata ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Rekapitulasi skor tanggapan PKL mengenai aspek tata ruang

No	Indikator	Jawaban PKL	Keterangan
1	Pengetahuan Terhadap Peraturan Tata Ruang	2,98	Cukup Memiliki Pengetahuan
2	Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Ruang	3,52	Baik
3	Relokasi atau Penataan Tempat Usaha	3,43	Baik

4	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang	3,69	Baik
Total		13,62	
Nilai Rata-rata		3,40	Baik

Berdasarkan tabel tersebut, skor tanggapan PKL tentang aspek tata ruang rata-rata mencapai 3,40 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa PKL menganggap indikator penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 3,69, sedangkan indikator pengetahuan terhadap peraturan tata ruang memiliki skor terendah sebesar 2,98. Rendahnya pengetahuan terhadap peraturan tata ruang menjadi penyebab banyaknya PKL yang mendirikan usahanya di tempat yang dilarang. Dalam hal ini, dinas terkait perlu melakukan sosialisasi tentang peraturan tata ruang terhadap para PKL.

Aspek Ketertiban Umum

Berdasarkan hasil jawaban PKL mengenai aspek ketertiban umum, rekapitulasi indikator aspek ketertiban umum dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Rekapitulasi skor tanggapan PKL mengenai aspek ketertiban umum

No	Indikator	Jawaban PKL	Keterangan
1	Penertiban Terhadap Kegiatan Usaha PKL	3,47	Baik
2	Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha PKL	3,85	Baik
3	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Ketertiban Umum	4,03	Baik
4	Pengendalian, Pembatasan dan	3,54	Baik

Pengurangan Jumlah PKL Dalam Satu Lokasi		
5	Pengaturan Waktu Usaha PKL	Baik
Total		18,57
Nilai Rata-rata		3,71 Baik

Berdasarkan tabel tersebut, skor tanggapan PKL tentang aspek ketertiban umum rata-rata mencapai 3,71 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa PKL menganggap indikator penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 4,03, sedangkan indikator penertiban terhadap kegiatan usaha PKL memiliki skor terendah yaitu sebesar 3,47. Dalam hal ini, upaya penertiban terhadap kegiatan usaha PKL yang dilakukan oleh dinas terkait perlu lebih dioptimalkan.

Kinerja Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil jawaban PKL mengenai kinerja pedagang kaki lima, rekapitulasi indikator kinerja pedagang kaki lima dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Rekapitulasi skor tanggapan PKL mengenai kinerja pedagang kaki lima

No	Indikator	Jawaban PKL	Keterangan
1	Kepuasan (<i>Satisfaction</i>)	3,78	Puas
2	Pencapaian Tujuan (<i>Goal Achievements</i>)	4,07	Setuju
Total		7,85	
Nilai Rata-rata		3,92	Baik

Berdasarkan tabel tersebut, skor tanggapan PKL tentang aspek kinerja pedagang kaki lima rata-rata mencapai 3,92 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa PKL menganggap indikator pencapaian tujuan (*goal achievements*) memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 4,07, sedangkan indikator kepuasan (*satisfaction*) memiliki skor terendah yaitu sebesar 3,78.

Hasil Estimasi Persamaan Regresi

$$Y = -9,918 + 0,447X_1 + 0,377X_2 + 0,409X_3 - 0,016X_4 - 0,050X_5 + \epsilon$$

$$R = 0,778; R^2 = 0,605; F_{\text{hit}} = 27,320; F_{\text{tab } 0,05} = 3,59.$$

$$t_{x_1y} = 7,342; t_{x_2y} = 5,810; t_{x_3y} = 5,048; t_{x_4y} = -0,394; t_{x_5y} = -1,156; t_{\text{tab } 0,05} = 1,740.$$

Berdasarkan persamaan tersebut, faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang dan ketertiban umum berpengaruh positif terhadap kinerja PKL. Dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat bahwa variabel bebas ekonomi (X_1), sosial (X_2) dan lingkungan (X_3) berpengaruh positif terhadap variabel terikat kinerja PKL (Y). Sedangkan variabel bebas tata ruang (X_4) dan ketertiban umum (X_5) berpengaruh negatif terhadap kinerja PKL (Y). Adapun hubungan antara kinerja PKL dengan faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang dan ketertiban umum menunjukkan angka korelasi 0,778, yang berarti memiliki hubungan yang kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang dan ketertiban umum memiliki hubungan yang kuat terhadap kinerja PKL bidang kuliner di wilayah Bogor Tengah. Hal ini berarti bahwa semakin baik faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang dan ketertiban umum terhadap kinerja PKL diduga juga akan meningkat. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase sumbangan pengaruh ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang dan ketertiban umum terhadap kinerja PKL. Nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,605 (60,5%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang dan ketertiban umum terhadap kinerja PKL sebesar 60,5%. Sedangkan 39,5% lainnya dipengaruhi faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian seperti faktor kemampuan, faktor motivasi dan sikap mental.

Analisis F-test

Nilai F_{tab} diperoleh sebesar 3,59 ditentukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,5 (=5%), menunjukkan bahwa nilai $F_{\text{hit}} (27,320) > F_{\text{tab}} (3,59)$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, dengan tingkat

kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari faktor ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang dan ketertiban umum terhadap kinerja PKL.

Analisis t-test

Hasil analisis uji-t menyatakan ada 2 variabel yang tidak signifikan yaitu variabel X4 (tata ruang) dan variabel X5 (ketertiban umum). Sedangkan untuk variabel X1, X2 dan X3 berpengaruh secara nyata terhadap kinerja PKL. Dari hasil perhitungan nilai t hitung untuk faktor ekonomi sebesar 7,342 dan t tabel sebesar 1,740, karena $t \text{ hitung } 7,342 > 1,740$, H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan faktor ekonomi berpengaruh secara nyata terhadap kinerja pedagang kaki lima.

Nilai t hitung untuk faktor sosial sebesar 5,810 dan t tabel sebesar 1,740, karena nilai t hitung untuk koefisien variabel faktor sosial lebih besar dari t tabel, yaitu $t \text{ hitung } 5,810 > 1,740$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan faktor sosial berpengaruh secara nyata terhadap kinerja pedagang kaki lima.

Nilai t hitung untuk faktor lingkungan sebesar 5,048 dan t tabel diperoleh nilai 1,740, karena nilai t hitung untuk koefisien variabel faktor lingkungan lebih besar dari t tabel, yaitu $t \text{ hitung } 5,048 > 1,740$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan berpengaruh secara nyata terhadap kinerja pedagang kaki lima.

Nilai t hitung untuk faktor tata ruang sebesar $-0,394$ dan diperoleh nilai t tabel = 1,740, karena nilai t hitung untuk koefisien variabel faktor tata ruang lebih kecil dari t tabel, yaitu $t \text{ hitung } -0,394 < 1,740$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor tata ruang tidak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja pedagang kaki lima.

Nilai t hitung untuk faktor ketertiban umum sebesar $-1,156$ dan t tabel 1,740, karena nilai t hitung untuk koefisien variabel faktor ketertiban umum lebih kecil dari t tabel, yaitu $t \text{ hitung } -1,156 < 1,740$ maka dapat disimpulkan bahwa faktor ketertiban umum tidak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja pedagang kaki lima.

Faktor Pendukung

a. Aspek Ekonomi

Dari sisi aspek ekonomi, PKL di wilayah Bogor Tengah memiliki kemudahan dalam memperoleh modal yaitu dengan meminjam pada keluarga, teman dan kerabat mereka. PKL tersebut juga memerhatikan kualitas produknya serta melengkapi sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan bagi para konsumen.

b. Aspek Sosial

Dari sisi aspek sosial, PKL di wilayah Bogor Tengah memerhatikan keamanan di sekitar lokasi usaha mereka serta pengawasan dari pemerintah terhadap penduduk urban (pendatang).

c. Aspek Lingkungan

Dari sisi aspek lingkungan, PKL di wilayah Bogor Tengah memerhatikan kebersihan dan keindahan lingkungan serta pengawasan dari dinas dengan membebaskan retribusi kebersihan kepada PKL.

Faktor Penghambat

Berikut beberapa penjelasan mengenai faktor-faktor penghambat dilihat dari berbagai aspek antara lain adalah sebagai berikut.

a. Aspek Tata Ruang

Dari sisi aspek tata ruang ialah masih rendahnya pengetahuan PKL tentang peraturan tata ruang. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya PKL yang mendirikan usahanya di lokasi yang tidak diperbolehkan.

b. Ketertiban Umum

Dari sisi aspek ketertiban umum ialah belum optimalnya tindakan penertiban yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap PKL yang belum mematuhi peraturan sehingga menyebabkan kesemrawutan dan kemacetan di sekitar lokasi serta pengawasan dari dinas yang belum optimal.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berikut beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

1. Dari perhitungan diperoleh F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% secara simultan, terdiri dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, tata ruang dan ketertiban umum mempunyai pengaruh terhadap kinerja PKL bidang kuliner.
2. Untuk uji secara parsial yaitu ekonomi (X_1), sosial (X_2) dan lingkungan (X_3) berpengaruh secara nyata terhadap kinerja PKL bidang kuliner, sedangkan tata ruang (X_4) dan ketertiban umum (X_5) tidak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja PKL bidang kuliner.
3. Faktor pendukung kinerja PKL adalah ekonomi, sosial dan lingkungan, sedangkan faktor penghambat kinerja PKL adalah tata ruang dan ketertiban umum.

Implikasi

Berikut beberapa implikasi yang diperoleh dari penelitian ini.

1. Lebih dioptimalkan penyuluhan dan sosialisasi mengenai informasi kemitraan antara PKL dengan Dinas Koperasi dan UMKM, sehingga memudahkan PKL yang ingin menjalin kerja sama dengan dinas tersebut.
2. Evaluasi dan penyuluhan perlu dilakukan secara optimal oleh dinas terkait terhadap kelembagaan atau asosiasi PKL dan peran koperasi harus lebih ditingkatkan.
3. Dinas Kebersihan Kota Bogor hendaknya harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran kebersihan yang dilakukan oleh PKL sehingga tercipta kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar lokasi PKL tersebut.
4. Dinas Koperasi dan UMKM hendaknya lebih optimal dalam melakukan sosialisasi terhadap peraturan tata ruang terhadap para PKL sehingga PKL tersebut tidak kekurangan informasi mengenai peraturan tata ruang.
5. Upaya penertiban terhadap kegiatan usaha PKL yang dilakukan oleh Dinas Satpol PP perlu lebih dioptimalkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan di sekitar lokasi PKL.

6. Untuk penelitian lanjutan agar meneliti faktor kemampuan, faktor motivasi dan sikap mental PKL yang dapat mempengaruhi kinerja PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana. 2006. Marginalisasi sektor informal perkotaan. ITS Press, Surabaya.
- Alma Buchari. 2006. Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa. Alfabeta, Bandung.
- Bromley R. 1979. Introduction-the urban informal sector. Why is it worth discussing? The urban informal sector: Critical perspectives on employment and housing policies. Pergamon Press, Oxford.
- De Soto H. 1989. The other path: the invisible revolution in the third world. Harper & Row, New York.
- Firdausy CM. 1995. Model dan kebijakan pengembangan sektor informal pedagang kaki lima. Pengembangan sektor informal pedagang kaki lima di perkotaan. Dewan Riset Nasional dan Bappenas Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI, Jakarta.
- Jhingan ML. 2008. Ekonomi pembangunan dan perencanaan. Edisi keenambelas. Raja grafindo, Jakarta.
- Korten David C. 2001. When corporations rule the world. Kumarian Press and Berret-Koehler Publishers, San Fransisco.
- Nasir Mohammad. 2003. Metode penelitian. Cetakan keempat. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sani AP. 2007. Evaluasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Provinsi DKI Jakarta. Tesis. Fakultas Kajian Pengembangan Perkotaan. Universitas Indonesia. Depok.
- Singarimbun Masri. 1995. Metode penelitian survei. LP3S, Jakarta.
- Wirawan. 2009. Evaluasi kinerja sumber daya manusia. Edisi 1. Salemba Empat, Jakarta.